

PENGARUH PAD, DAU, DAN SILPA PADA BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI PEMODERASI

Ni Putu Dwi Eka Rini Sugiardi¹
Ni Luh Supadmi²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia
e-mail: dwiekarinisugiardi@yahoo.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia

ABSTRAK

Pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam meningkatkan pelayanan dan kebutuhan di berbagai sektor salah satunya sektor publik, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan alokasi belanja modal yang lebih tinggi guna pembangunan sektor-sektor yang bermanfaat pada masing-masing daerah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU, dan SiLPA pada belanja modal, serta pengaruh PAD, DAU, dan SiLPA dengan moderasi pertumbuhan ekonomi pada belanja modal. Lokasi dari Penelitian ini yaitu Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bali dan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Hasil pengujian menunjukan PAD, DAU, dan SiLPA berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Variabel moderasi (pertumbuhan ekonomi) mampu memoderasi variabel PAD dan DAU, namun tidak mampu memoderasi variabel SiLPA pada belanja modal.

Kata Kunci: PAD, DAU, SiLPA, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal

ABSTRACT

Implementation of fiscal decentralization in improving services and needs in various sectors of the public sector one, giving authority to local governments to provide capital expenditure for the development of higher beneficial sectors in each region. The purpose of this study was to determine the effect of PAD, DAU, and SiLPA on capital expenditures, as well as the effect of PAD, DAU, and SiLPA with moderation of economic growth in capital expenditure. The location of this study, namely the Provincial Revenue Office of Bali and the Bali Provincial Statistics. The test results showed PAD, DAU, and SiLPA positive and significant impact on capital expenditures in the District / City in Bali Province. Moderating variables (economic growth) capable of moderating variable PAD and DAU, but not able to moderate variable SiLPA on capital expenditure.

Keywords: PAD, DAU, SiLPA, Economic Growth, Capital Expenditure

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, Otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah dalam mengurus dan mengatur sendiri kegiatan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Kusnandar & Siswantoro (2012) menyatakan pelaksanaan otonomi daerah menitikberatkan pada daerah kabupaten dan kota ditandai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari Pemerintah pusat ke Pemerintah daerah. Lin & Liu (2000) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal dapat memberikan perubahan yang berarti untuk pertumbuhan perekonomian suatu daerah.

Memasuki era desentralisasi fiskal sekarang ini, diharapkan adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor salah satunya adalah sektor publik, dengan adanya peningkatan dalam layanan di sektor publik akan dapat menambah daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasinya di daerah (Harianto & Adi, 2007). Bodman *et al.* (2009) menyatakan secara teoritis desentralisasi fiskal adalah devolusi tanggung jawab fiskal dan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dapat meningkatkan atau mengurangi pertumbuhan ekonomi. Faridi (2011) menyatakan fungsi utama dari desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan efisiensi sektor publik dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan pengembangan. Vo (2009) dalam penelitiannya menyatakan desentralisasi memiliki tidak hanya nilai administratif tetapi juga dimensi sipil karena meningkatkan kesempatan bagi warga untuk mengambil minat dalam urusan publik itu membuat mereka terbiasa dengan menggunakan kebebasan. Sementara itu, Malik *et al.* (2006) menyatakan desentralisasi struktur fiskal suatu negara adalah strategi yang efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian daerah adalah dengan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah yaitu dengan

memberikan proporsi alokasi belanja modal yang lebih tinggi pada sektor-sektor yang dianggap produktif (Nugroho, 2012). Belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran dalam pencapaian asset tetap serta asset lainnya yang dapat memberikan dampak positif lebih dari satu periode akuntansi (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010). Darwanto & Yustikasari (2007) menyatakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kepercayaan publik adalah dengan melakukan pergeseran pada komposisi belanja. Alexiou (2009) menyatakan bahwa belanja modal pemerintah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Faktor penentu penting pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah pengeluaran pemerintah. Modebe, *et al.* (2012) menyatakan pengeluaran pemerintah berulang memiliki dampak positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun Pertumbuhan ekonomi tergantung pada ukuran, kapasitas belanja, dan efektif menggunakan belanja modal di proses pembangunan (Sharma, 2012). Felix (2012) berpendapat bahwa Pemerintah Daerah semestinya dapat mengalokasikan belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan belanja rutin yang relatif kurang produktif. Peningkatan anggaran modal akan menyebabkan peningkatan belanja modal pada infrastruktur. Solikin (2007) menyatakan belum terorientasinya pengelolaan belanja modal pada publik menyebabkan alokasi belanja modal tidak terlaksana sepenuhnya bagi pemenuhan kesejahteraan publik.

Penyerahan berbagai kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah diikuti dengan pengalihan masalah pembiayaan. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah, salah satu asal pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut Daerah didasarkan pada Peraturan Daerah yang berlaku. Tujuan daripada PAD yakni memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam pendanaan otonomi daerah yang disesuaikan dengan potensi Daerah masing-masing. Penelitian yang dilakukan oleh Solikin (2007) menunjukkan bahwa terdapatnya hubungan positif serta signifikan PAD terhadap belanja modal. Berbeda dengan Solikin, penelitian yang dilakukan oleh Paujiah (2012) di Kota Tasikmalaya menunjukkan bahwa tidak terdapatnya pengaruh PAD terhadap belanja modal.

Perbedaan kemampuan keuangan yang dimiliki setiap daerah dalam hal pendanaan kegiatan pemerintahannya dapat memicu terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah. Sebagai upaya menghadapi ketimpangan fiskal tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan pengalokasian dana yang diperoleh dari APBN untuk pendanaan kebutuhan rumah tangga daerahnya untuk pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum adalah salah satu sumber pendapatan dari pemerintah pusat yang dialokasikan sebagai bentuk pemerataan serta keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Putro, 2011)

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum didefinisikan sebagai sumber pendapatan yang diperoleh dari pendapatan APBN yang dianggarkan untuk pemerataan alokasi keuangan antardaerah dalam pendanaan kelengkapan rumah tangga daerahnya. Tuasikal (2008) yang melakukan penelitian di Kabupaten/Kota di Indonesia memperoleh hasil dimana

terdapatnya pengaruh positif DAU terhadap belanja modal. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar & Siswantoro (2012) memperoleh hasil bahwa tidak terdapatnya pengaruh DAU terhadap belanja modal. Kondisi demikian disebabkan DAU yang diterima oleh daerah hanya diperuntukan untuk membiayai pengeluaran rutin, seperti untuk belanja pegawai dan hanya sedikit yang digunakan untuk belanja modal.

Sumber pendanaan lainnya untuk alokasi belanja modal penyediaan berbagai fasilitas publik adalah penerimaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006, SiLPA merupakan sisa dana yang diperoleh dari aktualisasi penerimaan serta pengeluaran anggaran daerah selama satu periode. SiLPA dalam hubungannya dengan belanja modal telah di teliti oleh Ardhini (2011) dengan lokasi penelitian di kabupaten/kota wilayah Jawa Tengah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sejalan dengan Ardhini, penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar & Siswantoro (2012) menunjukkan bahwa terdapatnya hubungan yang positif serta signifikan SiLPA terhadap belanja modal. Kondisi demikian memberikan informasi bahwa SiLPA adalah salah satu sumber pendanaan belanja modal. Liliana *et al.* (2011) menyatakan hubungan antara pendapatan pemerintah dan pengeluaran pemerintah adalah penting, mengingat relevansinya bagi kebijakan terutama berkenaan dengan defisit anggaran.

Pertumbuhan ekonomi merupakan parameter dari suatu kegiatan pembangunan, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dapat mengukur tingkat perkembangan aktivitas pada sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian (Hasan, 2012). Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai kondisi kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan produksi barang dan jasa bertambah sehingga terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat. Salah satu tujuan pemerintah daerah adalah pertumbuhan ekonomi yang meningkat setiap tahunnya. Salih (2012) dengan penelitiannya di Sudan, berpendapat bahwa Pertumbuhan PDB riil per kapita memiliki hubungan yang searah dengan pangsa belanja pemerintah terhadap PDB. Bataineh (2012) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah pada tingkat agregat memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Taiwo & Abayomi (2011) menunjukkan bahwa adanya hubungan yang positif antara PDB dan belanja modal.

Besarnya pertumbuhan ekonomi yang terdapat pada masing-masing daerah dapat memperkuat maupun memperlemah hubungan antara Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap belanja modal. Berdasarkan dari uraian di atas maka penelitian ini bermaksud untuk mengetahui seberapa besar PAD, DAU, dan SiLPA berpengaruh pada alokasi belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi di Provinsi Bali.

Kajian Pustaka

Teori Kontijensi

Hanu (2006) menyatakan teori kontijensi berdasarkan pada pemikiran bahwa secara universal, tidak terdapat sistem akuntansi manajemen yang tepat yang penerapannya dapat dilakukan pada organisasi. Teori kontijensi yang deskriptif membahas tentang mengapa pemimpin berperilaku berbeda antara satu situasi dengan situasi lainnya, sementara teori kontijensi yang preskriptif membahas perilaku yang paling efektif dalam setiap jenis situasi (Yukl, 2010).

Teori Agensi

Menurut Halim dan Abdullah (2006) Teori Keagenan yakni teori yang mengaitkan hubungan prinsipal dengan agen yang berasal dari teori ekonomi, keputusan, sosiologi, organisasi. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan di dalam teori keagenan terdapat hubungan yang diibaratkan sebagai sebuah kontrak yang mana satu atau lebih prinsipal menyewa orang lain, dalam hal ini disebut agen, untuk melakukan beberapa jasa demi kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal.

Teori Pilihan Rasional

Teori pilihan rasional adalah sebuah konsep yang menjelaskan bagaimana memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka atau dengan kata lain memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir biaya. Meskipun teori ini berakar

pada ilmu ekonomi, tetapi dalam perkembangannya teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi pada berbagai macam disiplin ilmu termasuk di dalamnya bagaimana menjelaskan sebuah pilihan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan publik.

Teori *Fiscal Federalism*

Teori *Fiscal Federalism* menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi diperoleh dengan desentralisasi fiskal melalui pelaksanaan otonomi daerah. Desentralisasi fiskal diartikan sebagai pelimpahan kewenangan terkait dengan pengambilan keputusan kepada pemerintah tingkat rendah (Akai & Sakata, 2002). Maggi dan Ladurner (2009) menyatakan bahwa *New Perspective Theory of Fiscal Federalism* lebih menekankan untuk melihat ke dalam setiap keputusan politik yang diambil oleh pemerintah, bagaimana pemerintah (eksekutif dan legislatif) berperilaku, berperan dan berpikir beserta lembaga-lembaga mereka.

Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian teori di atas, maka rumusan hipotesis penelitian ini adalah:

Ha.1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif pada Belanja Modal.

Ha.2: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif pada Belanja Modal

Ha.3: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif pada Belanja Modal

Ha.4: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif pada belanja modal

Ha.5: Semakin tinggi Pertumbuhan Ekonomi akan meningkatkan pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal

Ha.6: Semakin tinggi Pertumbuhan Ekonomi akan meningkatkan pengaruh positif Dana Alokasi Umum pada Belanja Modal

Ha.7: Semakin tinggi Pertumbuhan Ekonomi akan meningkatkan pengaruh positif Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada Belanja Modal

METODE PENELITIAN

Lokasi dari penelitian ini yaitu Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bali dan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Sementara itu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal di Provinsi Bali pada tahun 2007-2011 merupakan objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari dokumen-dokumen yang terdapat pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bali seperti Laporan Realisasi APBD Tahun 2007-2011 dan Tabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2007-2011 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Bali periode 2007–2011. Sedangkan sampel yang digunakan adalah seluruh anggota populasi yaitu kabupaten/kota se-Provinsi Bali yang terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota periode 2007-2011. Teknik analisis data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas; *Moderated Regression Analysis* (MRA); uji koefisien determinasi; uji kesesuaian model (uji f); dan uji t.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas

Tabel 1.
Hasil Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
N	43
Kolmogorov-Smirnov Z	0,824
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,505

Sumber: Data diolah, 2013

Tabel 1. menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov (K-S) adalah 0,824 dan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,505. Hal ini berarti data yang diuji terdistribusi normal.

Uji multikolinearitas

Tabel 2.
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
PAD	0,128	7,803
DAU	0,671	1,490
SiLPA	0,405	2,469
Pertumbuhan Ekonomi	0,226	4,429

Sumber: Data diolah, 2013

Tabel di atas menyatakan nilai *tolerance* untuk seluruh variabel lebih besar dari 10% dan VIF untuk semua variabel lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Uji autokorelasi

Tabel 3.
Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	2,021

Sumber: Data diolah, 2013

Tabel diatas menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 2,021 terletak diantara nilai d_U (1,663) dan $4-d_U$ (2,337) yang merupakan daerah bebas autokorelasi. Hal ini berarti data penelitian tidak mengandung gejala autokorelasi.

Uji heteroskedastisitas

Tabel 4.
Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig.
PAD (X_1)	0,711
DAU (X_2)	0,369
SiLPA (X_3)	0,103
Pertumbuhan Ekonomi (X_4)	0,934
Interaksi (X_1, X_4)	0,471
Interaksi (X_2, X_4)	0,510
Interaksi (X_3, X_4)	0,968

Sumber: Data diolah, 2013

Tabel 4. menunjukkan nilai signifikansi untuk setiap variabel bebas terhadap nilai absolute residual lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

Uji Kesesuaian Model (Uji F)

Tabel 5.
Uji Kesesuaian Model (Uji F)

Model	F	Sig.
1 Regression	23,278	0,000
Residual		
Total		

Sumber: Data diolah, 2013

Berdasarkan tabel dapat dilihat *p-value* sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis alternatif diterima. Hal ini berarti model regresi dapat digunakan untuk memprediksi belanja modal atau dapat dikatakan variabel PAD, DAU, SiLPA, pertumbuhan ekonomi, dan pemoderasi berpengaruh terhadap variabel dependennya yaitu belanja modal.

Koefisien Determinasi

Tabel 6
Koefisien Determinasi

Model	R Square	Adjusted R Square
1	0,823	0,788

Sumber: Data diolah, 2013

Tabel 6 menunjukkan nilai *adjusted R²* sebesar 0,788 yang memiliki arti bahwa 78,8% perubahan belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel PAD, DAU, SiLPA, pertumbuhan ekonomi, dan pemoderasi. Sedangkan sisanya 21,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

Moderated Regression Analysis

Tabel 7
Moderated Regression Analysis

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-30976,5	41505,256	-	-0,746	0,460
PAD (X ₁)	0,308	0,072	1,304	4,258	0,000
DAU (X ₂)	0,217	0,072	0,449	3,002	0,005
SiLPA (X ₃)	0,033	0,011	0,783	2,903	0,006
PE (X ₄)	0,467	0,336	0,953	1,392	0,173
Interaksi (X ₁ .X ₄)	-0,000000090	0,000	-1,546	-3,600	0,001
Interaksi (X ₂ .X ₄)	-0,000000023	0,000	-0,452	-2,518	0,017
Interaksi (X ₃ .X ₄)	-0,000000052	0,000	-0,667	-0,755	0,455
Adjusted R²					0,788
F Hitung					23,278
Sig. F					0,000

Sumber: Data diolah, 2013

Persamaan regresi yang dihasilkan melalui *Moderated Regression Analysis* (MRA) adalah sebagai berikut:

$$\text{BM} = -30976,5 + 0,308 \text{ PAD} + 0,217 \text{ DAU} + 0,033 \text{ SiLPA} + 0,467 \text{ PE} - 0,000000090 (\text{PAD} * \text{PE}) - 0,000000023 (\text{DAU} * \text{PE}) - 0,000000052 (\text{SiLPA} * \text{PE}) + e$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat diketahui bahwa nilai konstanta -30.976,5 memiliki arti apabila PAD, DAU, SiLPA dan pertumbuhan ekonomi konstan, maka pengalokasian belanja modal akan menurun sebesar 30.976,5 persen. Nilai koefisien regresi PAD sebesar 0,308 memiliki arti apabila PAD naik sebesar satu persen, maka pengalokasian belanja modal naik sebesar 0,308 persen dengan asumsi variabel lainnya konstan. Nilai koefisien regresi DAU sebesar 0,217 memiliki arti apabila DAU naik sebesar satu persen, maka

pengalokasian belanja modal naik sebesar 0,217 persen dengan asumsi variabel lainnya konstan. Nilai koefisien regresi SiLPA sebesar 0,033 memiliki arti apabila SiLPA naik sebesar satu persen, maka pengalokasian belanja modal naik sebesar 0,033 persen dengan asumsi variabel lainnya konstan. Nilai koefisien regresi Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,467 memiliki arti apabila pertumbuhan ekonomi yang diprosikan oleh PDRB atas dasar harga konstan naik sebesar satu persen, maka pengalokasian belanja modal naik sebesar 0,467 persen. Nilai koefisien regresi PAD*PE sebesar -0,000000090 menunjukkan bahwa efek moderasi yang diberikan adalah negatif, artinya semakin tinggi moderasi pertumbuhan ekonomi, maka pengaruh PAD pada pengalokasian belanja modal menurun. Nilai koefisien regresi DAU*PE sebesar -0,000000023 menunjukkan bahwa efek moderasi yang diberikan adalah negatif, artinya semakin tinggi moderasi pertumbuhan ekonomi, maka pengaruh DAU pada pengalokasian belanja modal menurun. Nilai koefisien regresi SiLPA*PE sebesar -0,000000052 menunjukkan bahwa efek moderasi yang diberikan adalah negatif, artinya semakin tinggi moderasi pertumbuhan ekonomi, maka pengaruh SiLPA pada pengalokasian belanja modal menurun.

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil Hipotesis kedua ($H_{a.1}$) diperoleh hasil nilai tingkat signifikansi uji t untuk variabel PAD sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0,308. Keadaan ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal, sehingga $H_{a.2}$ diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi PAD yang dimiliki oleh

daerah maka akan semakin tinggi belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Hasil Hipotesis pertama (Ha.₂) diperoleh hasil nilai tingkat signifikansi uji t untuk variabel DAU sebesar 0,005 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0,217. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal, sehingga Ha.₁ diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi DAU yang diterima oleh daerah dari pemerintah pusat maka akan semakin tinggi juga belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Hasil Hipotesis ketiga (Ha.₃) diperoleh hasil nilai tingkat signifikansi uji t untuk variabel SiLPA sebesar 0,006 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0,033. Keadaan ini menunjukkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal, sehingga Ha.₃ diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi SiLPA yang dimiliki oleh daerah maka semakin tinggi belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Hasil Hipotesis keempat (Ha.₄) diperoleh hasil nilai tingkat signifikansi uji t untuk variabel pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB sebesar 0,173 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0,467. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh pada belanja modal, sehingga Ha.₄ ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh antara pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal. Keadaan

ini memberi indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki kontribusi positif terhadap belanja modal.

Hasil Hipotesis kelima (Ha.₅) diperoleh hasil nilai tingkat signifikansi uji t untuk variabel pemoderasi pertumbuhan ekonomi mempengaruhi hubungan antara PAD dengan belanja modal sebesar 0,001 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar -0,000000090. Keadaan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan dapat memoderasi hubungan PAD pada belanja modal dengan intensitas dan arah yang berlawanan, sehingga Ha.₅ ditolak. Hasil penelitian ini memiliki arti bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada belanja modal semakin menurun.

Hasil Hipotesis keenam (Ha.₆) diperoleh hasil nilai tingkat signifikansi uji t untuk variabel pemoderasi pertumbuhan ekonomi mempengaruhi hubungan antara DAU dengan belanja modal sebesar 0,017 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar -0,000000023. Keadaan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan dapat memoderasi hubungan DAU pada belanja modal dengan intensitas dan arah yang berlawanan, sehingga Ha.₆ ditolak. Hasil penelitian ini memiliki arti bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka pengaruh Dana Alokasi Umum pada belanja modal semakin menurun.

Hasil Hipotesis ketujuh (Ha.₇) diperoleh hasil nilai tingkat signifikansi uji t untuk variabel pemoderasi pertumbuhan ekonomi mempengaruhi hubungan antara SiLPA dengan belanja modal sebesar 0,455 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ dan nilai

koefisien regresi sebesar $-0,000000052$. Keadaan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh dan tidak dapat memoderasi hubungan SiLPA pada belanja modal, sehingga $H_{a.7}$ ditolak.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari analisis data dan pembahasan, maka simpulan yang dapat diambil adalah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun anggaran 2007-2011. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun anggaran 2007-2011. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun anggaran 2007-2011. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan pada belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun anggaran 2007-2011. Pendapatan Asli Daerah merupakan variabel yang paling dominan diantara variabel lainnya yang mempengaruhi belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun anggaran 2007-2011. Hal ini terlihat dari tingkat signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai beta 0,308. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh Dana Alokasi Umum pada belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun anggaran 2007-2011 namun dengan arah yang negatif. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun anggaran 2007-2011 namun dengan arah yang negatif. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan dan tidak mampu

memoderasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun anggaran 2007-2011.

Saran yang dapat direkomendasikan adalah Pemerintah Daerah diharapkan agar lebih mengembangkan potensi dan sektor-sektor ekonomi daerah untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar lebih mandiri secara finansial dalam mendanai seluruh aktivitas pemerintahan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dengan sebijak mungkin untuk meningkatkan pengadaan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang akan meningkatkan produktivitas publik. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan data yang lebih lengkap dengan melakukan penelitian hingga tahun 2012 karena penulis tidak mendapatkan data tahun 2012 yang disebabkan belum terpublikasinya laporan pertanggungjawaban APBD untuk tahun yang bersangkutan.

REFERENSI

- Alexiou, Constantinos. 2009. *Government Spending and Economic Growth : Econometric Evidence from the South Eastern Europe (SSE)*. *Journal of Economic and Social Research* 11(1) : 1-16.
- Ardhini. 2011. Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Prespektif Teori Keagenan (studi pada kabupaten dan kota di Jawa Tengah). Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Bataineh, Ibrahim Mohamed Al. 2012. *The Impact of Government Expenditures on Economic Growth in Jordan*. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business*.
- Bodman, P., Kelly Ana Heaton and Andrew Hodge. 2009. *Fiscal Decentralisation and Economic Growth:A Bayesian Model Averaging Approach*. *MRG@UQ Discussion Paper*, School of Economics, University of Queensland.
- Darwanto & Yustikasari, Yulia. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.
- Faridi, Muhammad Zahir. 2011. *Contribution of Fiscal Decentralization to Economic Growth: Evidence from Pakistan*. *Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS)* Vol. 31, No. 1 (June 2011), pp. 1-13
- Felix, Olurankinse. 2012. *Analysis of the effectiveness of capital expenditure budgeting in the local government system of Ondo State, Nigeria*. *Journal of Accounting and Taxation*, 4(1), pp: 1-6.
- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2006. Hubungan dan masalah keagenan di Pemerintahan Daerah: sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1): 53-64.
- Hanu, La. 2006. *Perspektif Teori Kontijensi dalam Sistem Akuntansi Manajemen dan Sistem Pengendalian Manajemen*, Universitas Dharmawangsa.

<http://isjd.pdii.lipi.go.id/index.php/Search.html?act=tampil&id=42498&idc=28>. Diunduh 11 November 2013

- Harianto, David dan Priyo Hadi Adi. 2007. Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan per Kapita. *Simposium Nasional Akuntansi X*, Makassar, 26-28 Juli 2007.
- Hasan, T.I.B. 2012. Pengaruh Belanja Modal Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penduduk Miskin di Aceh. *Journal SAINS Riset*, 1(1).
- Jensen, M. C and Meckling, W.H. 1976. *Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure* . *Journal of Financial Economics*, Oktober, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360. Available from: <http://papers.ssrn.com>
- Kusnandar & Dodik Siswanto. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal.
- Liliana, Bunescu, Mihaiu Diana and Comaniciu Carmen. 2011. *Is There a Correlation between Government Expenditures, Population, Money Supply, and Government Revenues?*. *International Journal of Arts & Sciences*, pp: 241-254.
- Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu. 2000. *Fiscal Decentralization and Economic Growth in China*. *Economic Development and Cultural Change*. Chicago. Vol 49. Hal : 1 – 21.
- Malik, Shahnawaz, Mahmood-ul-hassan and Shahzad Hussain. 2006. *Fiscal Decentralization and Economic Growth in Pakistan*. *Department of Economics, Bahauddin Zakariya University, Multan, Pakistan*.
- Modebe, N.J., Regina G. Okafor, J.U.J Onwumere and Imo G. Ibe. 2012. *Impact of Recurrent and Capital Expenditure on Nigeria's Economic Growth*. *European Journal of Business and Management*, 4 (19), pp: 66-74.
- Nugroho, Fajar. 2012. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Propinsi Jawa Tengah). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Paujiah, Sri Puji. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal. Universitas Siliwangi.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Putro, Nugroho Suratmo & Pamudji, Sugeng. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Salih, Mohame Abdel Rahman. 2012. *The Relationship between Economic Growth and Government Expenditure: Evidence from Sudan. International Business Research; Vol. 5, No. 8; 2012*
- Sharma, Basudev. 2012. *Government expenditure and economic growth in Nepal: a minute analysis. Journal of Business Management and Accounts ISSN 2315-6899 Vol. 1(4) pp. 37-40 October 2012.*
- Solikin, Ikin. 2007. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal di Jawa Barat.
- Taiwo, Muritala dan Taiwo Abayomi. 2011. *Government Expenditure and Economic Development. European Journal of Business and Management, 3(9).*
- Tuasikal, Askam. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi, 1(2), h:142-155.*
- Vo, Duc Hong. 2009. *The Economics of Fiscal Decentralization.*